



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DWI AGUS PRASODJO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL
3. NHK : 34157

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **3.400.410.000**

1. Tanah Seluas 489 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,  
Rp. 1.879.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA UTARA , Rp. 695.700.000
3. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,  
HASIL SENDIRI Rp. 562.710.000
4. Tanah Seluas 2.515 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL  
SENDIRI Rp. 113.000.000
5. Tanah Seluas 2.367 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL  
SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **885.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
89.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 AT Tahun 2022, HASIL  
SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BEJ AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.  
17.500.000
4. MOTOR, HONDA M1KO3Q33LO AT Tahun 2025, HASIL SENDIRI  
Rp. 29.000.000



5. MOBIL, CHERY TIGGO 8CSH Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.  
450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 456.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 98.404.890

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.840.314.890

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.840.314.890

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.